

Kelembagaan pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara

Institutional Patterns of Mangrove Ecotourism in Bali Beach, Batu Bara Regency, North Sumatera Province

Ahmad Muhtadi^a * dan Pesta Saulina Sitohang

^a Program Studi Manajemen Sumberdaya Akuatik, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove dapat dilakukan dalam bentuk kelembagaan yang dibangun berbasis masyarakat. Kelembagaan dapat berupa organisasi atau wadah (*players of the game*) dan aturan main (*rules of the game*) yang mengatur kelangsungan organisasi maupun kerjasama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Kajian ini diperlukan untuk membuat suatu model atau pola pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat. Kajian ini dilakukan di ekowisata mangrove di Pantai Bali, Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Data yang dikumpulkan adalah kondisi sosial-ekonomi dan kelembagaan masyarakat sekitar serta karakteristik pengunjung. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Analisis kelembagaan mengacu pada konsep kelembagaan dari Taryono (2009) dan Ruddle (1998). Hasil yang diperoleh adalah karakteristik usia masyarakat yang banyak memanfaatkan Pantai Bali tertinggi pada usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 54%. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove, diperoleh 80%. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan diperoleh hasil karakteristik usia pengunjung yang paling banyak pada kisaran 20-29 tahun dengan latar belakang pendidikan SLTA sebesar 65%. Saat ini terjadi dualisme pengelolaan mangrove antara masyarakat sekitar dengan PT. Obor. Perbaikan dalam struktur organisasi pengelolaan minawana menjadi langkah pertama dalam perbaikan pengelolaan. Oleh karena itu, pemerintah tentunya perlu memberikan kewenangan terhadap Kelompok Tani Hutan sebagai organisasi resmi yang mengatur pengelolaan di lapangan. Langkah selanjutnya adalah perbaikan pengelolaan minawana adalah perbaikan dalam aturan main dalam pengelolaan. Aturan main ini terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap pengelolaan minawana. Selain itu, tentunya sanksi atau imbalan apa yang diperoleh jika melanggar aturan yang ditetapkan.

Kata kunci: Ekowisata; Kelembagaan; Pantai Bali

Abstract

Community involvement in the management of mangrove ecotourism can be done in the form of community-based institutions are built. Institutions may be in an organization or container (*players of the game*) and rules (*rules of the game*), which regulates the survival of the organization as well as the cooperation between members to achieve a common goal. This study is required to make a model or pattern of mangrove community-based ecotourism management. The study was conducted in the mangrove eco-tourism in Bali Beach, District Talawi Coal County. The data collected is the socio-economic and institutional surrounding communities as well as the characteristics of the visitors. Data was analyzed using descriptive analysis terhadap socio-economic conditions of society. Institutional analysis refers to the institutional concept of Taryono (2009) and Ruddle (1998). The results obtained are characteristic of the age of the people who are making use of the highest Bali Beach at the age of 20-29 years is 54%. Community involvement in ecotourism activities mangrove, gained 80%. Based on interviews conducted in the field result age characteristics of the visitors most in the range of 20-29 years old with a high school education background belakangg by 65%. When this happens the dualism between the surrounding community mangrove management with PT. Torch. Improvements in management organizational structure minawana be the first step in improving the management. Therefore, the government would need to give the authority to the Forest Farmers Group as an official organization governing the management field. The next step is to improve management of minawana is an improvement in the management rules. This rule is related to what can and can not do against minawana management. In addition, of course, sanctions or rewards what is gained if it violates the rules set

Keywords: Ecotourism; Institutional patterns, Bali Beach

* Korespondensi: Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan,
Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
Jl. Prof. A. Sofyan No.3, Kampus USU, Medan 20155.
Tel: +62-61-8213236 Fax: +62 61 8211924
e-mail: ahmad.muhtadi@usu.ac.id

1. Pendahuluan

Pantai Bali terletak di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Batu Bara. Pantai ini sangat unik dengan pantai pasir putih dengan hamparan pohon mangrove di bagian belakang. Hasil kajian Sitompul et al. (2014) mendapatkan bahwa mangrove di pantai Bali ditemukan 10 jenis dengan kondisi ekologi tergolong masih baik. Adanya kekhasan pantai ini sangat berpotensi untuk dikembangkan ekowisata. Lebih lanjut berdasarkan hasil kajian Sitohang et al. (2014) mendapatkan bahwa Pantai Bali dapat dijadikan ekowisata mangrove dengan nilai indeks kesesuaiannya berada pada kategori sesuai dan sesuai bersyarat. Daya dukung kawasan (DDK) untuk kategori sesuai sebanyak 37 dan 16 orang untuk stasiun II dan III, kategori sesuai bersyarat sebanyak 12 orang untuk stasiun I.

Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk ekowisata sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari *standart classic* menjadi *alternative tourism*. Wisatawan yang datang tidak hanya untuk melakukan wisata semata, melainkan ada informasi dan pengetahuan baru terkait kegiatan wisata yang bersangkutan (Sitohang et al., 2014). Pemanfaatan mangrove secara lestari dalam jangka panjang, tidak hanya terkait dengan analisis teknis, tetapi memerlukan analisis sosial ekonomi dan kelembagaan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya sangat penting, karena mereka juga mempunyai pengetahuan ekologis lokal (*LEK =local ecological knowlegde*) yang berperan dalam usaha pengelolaan sumberdaya alam (Joshi et al., 2004), termasuk sumberdaya mangrove.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove dapat dilakukan dalam bentuk kelembagaan yang dibangun berbasis masyarakat (Rangkuti, 2013). Kelembagaan (institusi) bisa berkembang baik jika ada infrastruktur kelembagaan (*institutional infrastructure*), ada penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dan mekanisme kelembagaan (*institutional mechanism*). Kelembagaan dapat berupa organisasi atau wadah (*players of the game*) dan aturan main (*rules of the game*) yang mengatur kelangsungan organisasi maupun kerjasama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama (Taryono, 2009). Penggalakan kegiatan ekowisata ini nantinya diharapkan dapat menjaga kelestarian sumberdaya serta dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu desain atau model pengelolaan yang adaptif yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Untuk itu diperlukan desain kelembagaan yang adaptif didasarkan pada karakteristik sumberdaya, lingkungan maupun pengelolaannya. Perbaikan dalam struktur organisasi pengelolaan ekowisata mangrove menjadi langkah pertama dalam perbaikan pengelolaan. Langkah selanjutnya dalam perbaikan pengelolaan ekowisata mangrove adalah perbaikan dalam aturan main pengelolaan (Taryono, 2009). Oleh karena itu kajian ini diperlukan untuk membuat suatu model atau pola pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat yang nantinya dapat diterapkan di tempat lain.

2. Bahan dan metode

2.1. Metode Pengambilan Data Persepsi Masyarakat dan Pengunjung

Kajian ini dilakukan pada kawasan wisata mangrove, Pantai Bali, Kecamatan Talawi, Kabupaten batubara. Kajian ini merupakan kajian lanjutan dari penelitian Sitohang et al., (2014) tentang ekowisata mangrove di Pantai Bali, Kecamatan talawi kabupaten Batubara. Data dan persepsi masyarakat dan pengunjung terhadap sarana dan prasarana penunjang wisata, kualitas ekologi, pengetahuan terhadap ekowisata dan mangrove dapat. Data dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara secara terstruktur dengan responden (pedoman dengan kuisioner). Jumlah responden menggunakan nilai galat 5% untuk masyarakat dan pengunjung. Metode pengambilan sampel/responden yang digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan), yaitu cara pengambilan sampel dengan disengaja dengan tujuan sampel tersebut dapat mewakili setiap unsur yang ada dalam populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang berkunjung ke Pantai Bali dalam waktu satu bulan dan masyarakat sekitar Pantai Bali. Sampel data yang diambil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin diacu oleh Setiawan (2007):

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel yang dibutuhkan
N : Ukuran populasi
d : Galat pendugaan

2.2. Analisis sosial-ekonomi pengunjung dan masyarakat

Analisis data sosial ekonomi masyarakat dan pengunjung dilakukan secara deskriptif dengan dibantu microsoft excel dalam pembuatan grafik ataupun diagram.

2.3. Analisis kelembagaan

Kelembagaan dapat berupa organisasi atau wadah (*players of the game*) dan aturan main (*rules of the game*) yang mengatur kelangsungan organisasi maupun kerjasama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama (Taryono 2009). Oleh karena itu pengembangan kelembagaan pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali mencakup perbaikan organisasi pengelolaan dan aturan main pengelolaan. Perbaikan organisasi pengelolaan dengan melihat kondisi organisasi pengelolaan eksisting dan melihat kesenjangan dengan kondisi yang seharusnya. Kemudian merumuskan organisasi untuk mengoptimalkan koordinasi dan komando antar pihak yang terlibat.

Untuk aturan main pengelolaan kawasan pesisir mengacu pada konsep pengelolaan yang dikembangkan oleh Ruddle (1998). Seperti halnya organisasi pengelolaan dengan melihat kondisi eksisting terhadap aturan main yang ada saat ini yang disbanding dengan kondisi yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya merumuskan/modifikasi aturan main peneglolaan sesuai dengan kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang. Pola pengelolaan dari Ruddle (1998) mengacu pada struktur kelembagaan yang terdiri dari:

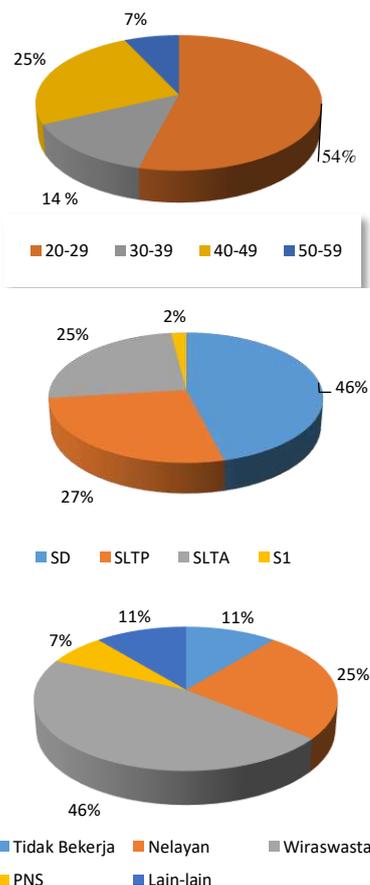
1. Kewenangan (*authority*) hal ini akan terkait dengan wilayah kekuasaan dan bagaimana sistem pinjam dari pemerintah kepada penggarap tambak.
2. Tata aturan (*rules*) hal ini akan berkaitan dengan norma/peraturan yang mengikat antara Pemerintah dan masyarakat, terkait apa dan bagaimana perjanjian terhadap pemanfaatan sumberdaya.
3. Hak (*right*) hal ini berkaitan dengan hak-hak dari kedua belah pihak yang berhubungan dengan perjanjian pemanfaatan sumberdaya
4. Pemantauan dan kontrol (*monitoring*) hal ini berkaitan dengan bagaimana pemantauan dari pihak pemerintah terhadap pelaksanaan terhadap semua aturan, norma, perjanjian maupun sanksi yang disepakati. Selain itu keterlibatan masyarakat (lembaga lokal) terhadap monitoring juga perlu di analisis apakah perlu dilibatkan ataupun tidak.
5. Sanksi (*sanctions*) hal ini berkaitan dengan sanksi yang ditetapkan dan bagaimana pelaksanaannya.

3. Hasil dan pembahasan

3.1. Kondisi ekonomi, sosial dan budaya

3.1.1. Karakteristik masyarakat pemanfaatan ekosistem mangrove

Masyarakat yang diwawancarai adalah masyarakat yang bermukim di kecamatan talawi dan sebagian besar masyarakat yang memanfaatkan Pantai Bali. Jumlah responden dari masyarakat sebanyak 44 orang, terdiri atas 33 orang laki-laki dan 11 orang perempuan (Gambar 1).

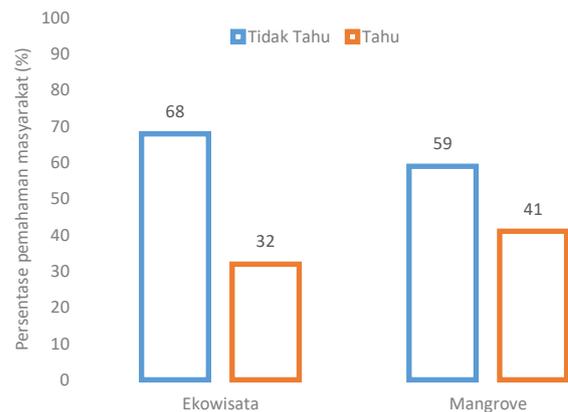


Gambar 1. Karakteristik masyarakat pemanfaat ekosistem mangrove.

Sebagian besar usia masyarakat yang memanfaatkan Pantai Bali berkisar antara 20- 29 tahun dengan persentase 54%, kisaran usia 30-39 tahun adalah 14%, kisaran usia 40-49 tahun adalah 25%, kisaran usia 50-59 tahun adalah 7% dan tidak terdapat masyarakat yang usianya < 20 tahun atau > 59 tahun yang memanfaatkan Pantai Bali. Secara umum pendidikan masyarakat di sekitar Pantai Bali masih rendah. Pendidikan SD sebanyak 27%, SLTP sebanyak 46%, SLTA dan sederajat sebanyak 25%, dan S1 sebanyak 2%. Berdasarkan karakteristik pekerjaan, terdapat masyarakat yang tidak bekerja sebanyak 11%, nelayan sebanyak 25%, wiraswasta sebanyak 11%, PNS sebanyak 7% dan lain- lain (Pengelola pantai, Guru honor, Kepala desa) sebanyak 11%. Masyarakat di Kabupaten Batu Bara terkhususnya di Kecamatan Talawi sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani dan nelayan.

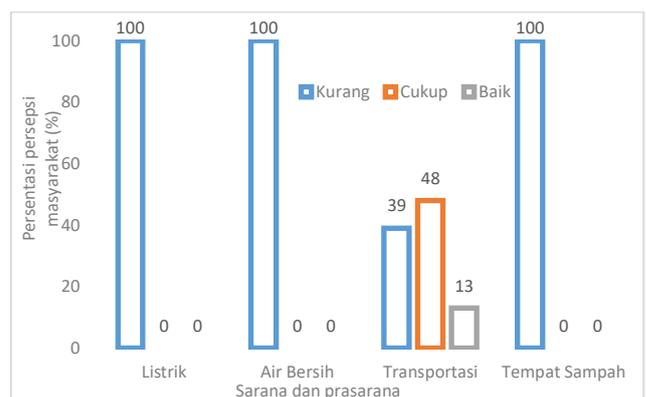
3.1.2. Pemahaman dan persepsi masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap ekosistem mangrove cukup baik. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui pengertian ekosistem mangrove secara umum dan fungsinya. Namun ada beberapa masyarakat yang sama sekali belum mengetahui tentang ekosistem mangrove dan lebih dari 50% masyarakat sekitar Pantai Bali belum mengenal istilah ekowisata (Gambar 2).



Gambar 2. Pemahaman masyarakat terhadap ekowisata dan mangrove.

Sarana dan prasarana adalah satu kunci utama yang akan mendukung keberhasilan pengembangan suatu kawasan wisata. Hasil kuisisioner masyarakat mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana yang mencakup listrik, air bersih dan tempat sampah di Pantai Bali masih dalam keadaan tidak memadai dengan kualitas kurang. Transportasi menuju daerah wisata Pantai Bali dapat digolongkan pada kondisi yang cukup baik (Gambar 3)



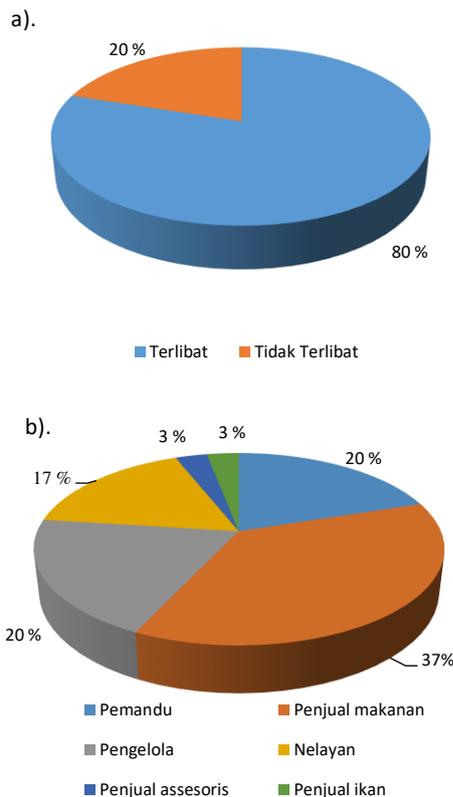
Gambar 3. Persepsi masyarakat terhadap sarana dan prasarana.

3.1.3. Kegiatan pemanfaatan Pantai Bali

Masyarakat sebagian besar melakukan kegiatan pemanfaatan Pantai Bali untuk kegiatan penangkapan ikan, udang, kepiting, lokan, budidaya kerapu dan sebagian kecil untuk kegiatan perkebunan. Alasan masyarakat melakukan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat dan didukung dengan potensi sumberdaya alam yang tersedia di daerah tersebut cukup tinggi.

3.1.4. Keterlibatan masyarakat

Satu diantara tujuan kegiatan ekowisata adalah untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekowisata sangat penting, karena merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Dari hasil wawancara, sebagian besar dari masyarakat (80%) berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan ekowisata dan 20% masyarakat tidak berkeinginan untuk ikut terlibat dalam kegiatan ekowisata (Gambar 4). Masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan ekowisata ini nantinya ada yang bersedia menjadi pemandu (guide), penjual makanan, penjual ikan, penjual asesoris, nelayan dan pengelola. Masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan ini dikarenakan lebih memilih bekerja diluar kawasan Pantai Bali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

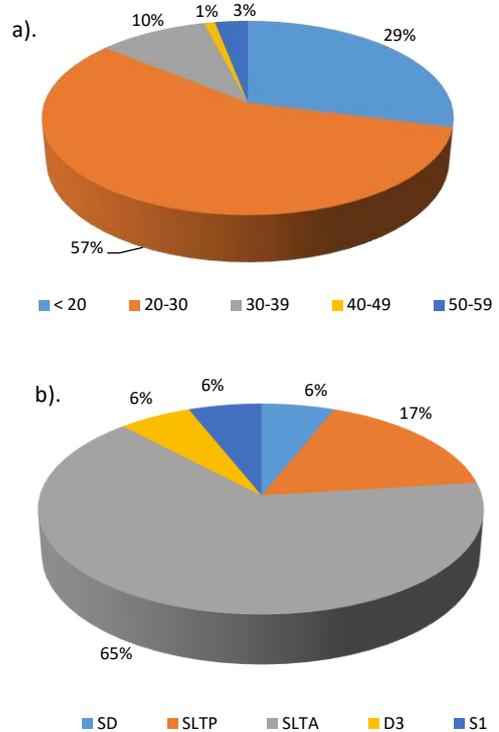


Gambar 4. Perlibatan masyarakat. a). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata, b). Pekerjaan masyarakat yang ikut terlibat.

3.1.5. Karakteristik pengunjung

Jumlah pengunjung yang diwawancarai sebanyak 80 orang. Pengunjung yang diwawancarai adalah pengunjung yang datang ke Pantai Bali dan melakukan kegiatan pemanfaatan seperti kegiatan wisata. Usia pengunjung didominasi oleh kisaran

usia <20 tahun sebanyak 29%, kisaran usia 20-29 tahun sebanyak 57%, kisaran usia 30-39 tahun sebanyak 10%, kisaran usia 40-49 tahun sebanyak 1% dan kisaran 50-59 tahun sebanyak 3%. Tingkat pendidikan pengunjung sangat bervariasi. Tingkat pendidikan SD yang diperoleh dari hasil wawancara sebanyak 6%, SLTP sebanyak 17%, SLTA sebanyak 65%, D3 sebanyak 6%, dan tingkat pendidikan S1 sebanyak 6% (Gambar 5).

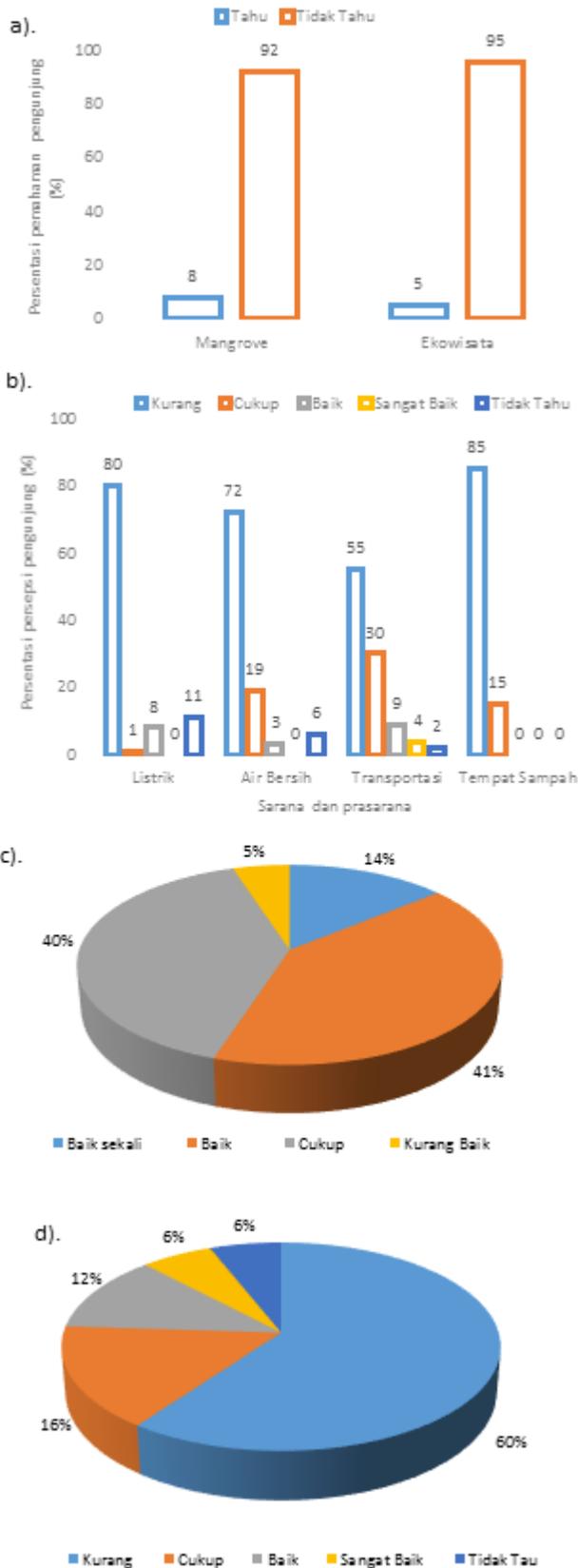


Gambar 5. Karakteristik pengunjung. a). Karakteristik usia, b). Pendidikan pengunjung

3.1.6. Pemahaman dan persepsi pengunjung

Secara umum pemahaman pengunjung tentang ekosistem mangrove dan ekowisata masih sangat rendah. Kegiatan ekowisata dalam pelaksanaannya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengunjung tentang ekosistem mangrove. Pengunjung Pantai Bali mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana seperti listrik, air bersih, transportasi dan tempat sampah belum memadai. Wisata yang akan dikembangkan di suatu wilayah harus didukung dengan adanya fasilitas umum penunjang kegiatan, seperti kamar mandi umum, tempat sampah dan fasilitas lainnya (Gambar 6).

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pengunjung, daerah Pantai Bali termasuk dalam kategori yang baik dalam pemberian sambutan terhadap pengunjung oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai satu kelebihan masyarakat dalam mempromosikan daerah wisatanya, dimana pengunjung merasa nyaman untuk melakukan kegiatan wisata di daerah tersebut. Masyarakat Pantai Bali masih kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan karena pengunjung sebagian besar masih merasa lingkungan disekitar Pantai Bali dalam keadaan yang tidak terawat (masih banyak dijumpai sampah-sampah yang berserakan). Hal ini terjadi karena masih minimnya ketersediaan prasarana dan sarana dalam penunjang kelestarian lingkungannya terutama tempat sampah.



Gambar 6. Pemahaman dan persepsi pengunjung kawasan ekowisata. a). Persepsi pengunjung terhadap mangrove dan ekowisata, b). Sarana dan prasarana, c). Sambutan masyarakat, d). Kesadaran masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat diperoleh karakteristik usia masyarakat yang banyak memanfaatkan Pantai Bali tertinggi pada usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 54%. Hal ini berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat Pantai Bali yang masih rendah, dimana banyak

masyarakat yang sudah bekerja di usia dini dikarenakan tidak bersekolah lagi dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan wawancara terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove, diperoleh 80% masyarakat yang berkeinginan untuk ikut serta dalam kegiatan ekowisata mangrove. Hal ini didasari pada keinginan masyarakat memperoleh pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta keinginan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan Pantai Bali secara berkelanjutan.

Menurut Gunawan (2013) menyatakan bahwa dukungan dan keinginan masyarakat sekitar terhadap adanya ekowisata di kawasan cagar alam pulau sempu cukup tinggi dengan nilai 83,33%. Menurut mereka adanya ekowisata akan membuat desa semakin maju dan akan memberi peluang pekerjaan baru dimasa mendatang. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keinginan untuk bisa terlibat dalam pengembangan wisata alam dengan menjadi pemandu wisata, jasanya berjualan perahu dan membuka warung makan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan diperoleh hasil karakteristik usia pengunjung yang paling banyak pada kisaran 20-29 tahun. Hal ini dikarenakan daya tarik berwisata lebih tinggi pada usia tersebut, dimana pengunjung terbanyak didominasi oleh para pelajar yang ada di Kabupaten Batu Bara. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pengembangan ekowisata mangrove nantinya. Pemuda dan pemudi dapat memiliki tambahan wawasan lingkungan dengan diperkenalkannya ekosistem mangrove tersebut dan dapat menciptakan pemuda-pemudi yang cinta akan kelestarian lingkungannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa selain berpotensi baik dalam keberadaan mangrovenya, Pantai Bali juga memiliki daya tarik dalam hal keberadaan faunanya, dimana banyak dijumpai jenis burung yang beranekaragam serta keberadaan pasir putih di pinggir pantai juga menjadikan Pantai Bali menjadi salah satu Pantai di Kabupaten Batu Bara yang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi ekowisata mangrove. Hal ini sesuai dengan penelitian Gunawan (2013) yang menyatakan bahwa potensi keanekaragaman flora dan fauna merupakan modal dalam pengembangan ekowisata. Semakin banyak potensi daya tarik wisata alam yang ada pada suatu kawasan akan semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung pada kawasan.

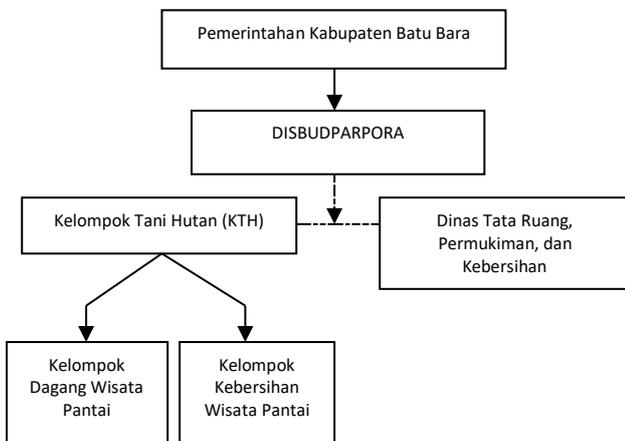
3.2. Pengelola ekowisata Pantai Bali

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terjadi konflik terhadap status pengelolaan Pantai Bali yang selama ini tidak jelas. Masyarakat merasa terganggu dengan adanya pihak ke tiga yang beranggapan memiliki sepenuhnya hak pengelolaan atas pantai ini. Hal ini yang menjadi satu penyebab tidak berjalannya dengan baik suatu sistem pengelolaan di pantai tersebut. Pemerintah dalam hal ini juga tidak bertindak tegas menanggapi masalah ini dan harus ikut serta dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Dalam uraian diatas (berdasarkan hasil pengamatan potensi mangrove, analisis kesesuaian ekowisata mangrove, hasil wawancara terhadap masyarakat dan pengunjung serta penentuan daya dukung kawasan dan alternatif track) diperoleh kesimpulan bahwa Pantai Bali memiliki potensi yang tinggi dan sesuai dijadikan sebagai obyek ekowisata mangrove. Organisasi pengelolaan Pantai Bali untuk kegiatan ekowisata mangrove yang akan dilakukan nantinya berpusat pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai pemilik hutan lindung dan pembuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan obyek ekowisata mangrove. Pemerintah memberikan mandat kepada Dinas Kebudayaan,

Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Batu Bara sebagai dinas pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali. Selanjutnya Pemerintah memberikan surat izin pengelolaan pantai kepada masyarakat sekitar sebagai pengelola pihak pertama dan memiliki izin yang sah serta menetapkan peraturan-peraturan berdasarkan diskusi bersama terhadap perencanaan, pengelolaan maupun pengembangan kawasan wisata tersebut. Pentingnya partisipasi masyarakat terutama karena masyarakat setempat berada dan tinggal di wilayah pesisir yang dikelola, sehingga partisipasi masyarakat tersebut sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Masyarakat yang terlibat merupakan masyarakat yang memiliki keinginan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam, selain itu masyarakat memiliki tanggungjawab terhadap pengembangan kawasan.

Dalam melaksanakan pengembangan kawasan mangrove menjadi suatu kawasan wisata, hal yang terpenting untuk tetap dijaga kelestariannya adalah potensi mangrove itu sendiri. Bentuk pelestarian kawasan mangrove perlu ditetapkan melalui partisipasi masyarakat dalam organisasi kawasan hutan yaitu membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Masyarakat membangun hutan mangrove bersama-sama dengan kelompoknya dan membentuk program kerja yang akan di laksanakan. Keberadaan KTH dapat tetap menjaga kelestarian mangrove yang berada di Pantai Bali. Selanjutnya KTH membentuk kelompok dagang wisata pantai, yang sangat efektif untuk dilakukan dimana masyarakat yang berdagang di sekitar area wisata harus memiliki persetujuan berdagang dari pihak pengelola. Kelompok dagang wisata pantai ini akan semakin mempermudah pihak pengelola dalam melakukan kontrol dalam kegiatannya, selain itu kelompok dagang wisata pantai ini juga memiliki tanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan dalam kegiatan perdagangan di Pantai Bali (Gambar 7).



Gambar 7. Organisasi pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata mangrove di Pantai Bali harus disediakan dengan baik. Sarana dan prasarana yang baik menjadikan pengunjung merasa lebih nyaman dalam berwisata. Hal terpenting dalam penyediaannya adalah keberadaan tempat sampah di sekitar kawasan wisata dan penyediaan toilet umum. Keberadaan tempat sampah sangat mempengaruhi keindahan suatu tempat wisata. Letak tempat sampah sebaiknya berada di dekat pondok-pondok dagangan masyarakat, pondok-pondok peristirahatan pengunjung, dan disekitar area tracking mangrove. Sampah yang dibawa pengunjung dalam melakukan tracking harus diperhatikan oleh pihak pengelola dan pemandu wisata mangrove dimana jumlah sampah yang dibawa sebelum dan sesudah memasuki kawasan tracking harus sama, guna menjaga kebersihan lingkungan disekitar area tracking.

Pengangkutan sampah secara rutin penting untuk ditetapkan agar kebersihan kawasan wisata tetap terjaga. Masyarakat dan Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Kebersihan bekerja sama dalam kegiatan ini.

Pola pengelolaan perlu ditetapkan dalam suatu kawasan wisata guna meminimalkan dan mencegah terjadinya konflik antar pemanfaat sumberdaya tersebut. Konflik tersebut seharusnya dapat diatasi dengan pengelolaan yang baik dan memperhatikan keseimbangan ekosistem mangrove. Salam (2000) menyatakan bahwa pendekatan ekowisata merupakan salah satu kegiatan yang relatif kecil memberikan dampak kerusakan, dan jika dikelola dengan baik akan sesuai untuk konservasi biodiversitas dan menghasilkan nilai ekonomi.

4. Kesimpulan

- Secara umum variasi kandungan unsur hara (N, P dan Si) yang Karakteristik usia masyarakat yang banyak memanfaatkan Pantai Bali tertinggi pada usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 54%. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove, diperoleh 80%. Karakteristik usia pengunjung yang paling banyak pada kisaran 20-29 tahun dengan latar belakang pendidikan SLTA sebesar 65%. Saat ini terjadi dualisme pengelolaan mangrove antara masyarakat sekitar dengan PT. Obor
- Perbaikan pengelolaan ekowisata mangrove setidaknya fokus terhadap kelembagaan yakni sistem organisasi dan aturan main.
 - Perbaikan dalam struktur organisasi pengelolaan minawana menjadi langkah pertama dalam perbaikan pengelolaan. Oleh karena itu, pemerintah tentunya perlu memberikan kewenangan terhadap KTH sebagai organisasi resmi yang mengatur pengelolaan dilapangan.
 - Langkah selanjutnya adalah perbaikan pengelolaan minawana adalah perbaikan dalam aturan main dalam pengelolaan. Aturan main ini terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap pengelolaan minawana. Selain itu, tentunya sanksi atau imbalan apa yang diperoleh jika melanggar aturan yang ditetapkan.

Bibliografi

- Laxman, J., Arévalo, L., Luque, N., Alegre, J., Sinclair, F., 2004. *Local ecological knowledge in natural resource management. Draft manuscript for "Bridging Scales and Epistemologies" conference*. Alexandria, Egypt: 17-20 May 2004.
- Gunawan, A., Hari, P, dan Bambang, S., 2013. Peluang Usaha Ekowisata di Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10 (4): 247-263.
- Muhtadi, R. A., 2013. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Minawana (Studi Kasus: Kawasan Mangrove Rph Tegal-Tangkal Kph Purwakarta, Blanakan, Subang, Jawa Barat)*. [Tesis]. Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ruddle, K., 1998. *Traditional Community - Based Coastal Marine Fisheries Management in Viet Nam*. Ocean dan Coastal Management. Elsevier Sciences.
- Salam, M., A., Ross, L.G., and Beveridge, M.C.M., 2000. *Eco-tourism to protect the reserve mangrove forest the*

sundarbans and its flora and fauna. Jurnal Anatolia 11 (1): 56-66.

Setiawan, N., 2007. Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya. Universitas Padjadjaran. Bandung.

Sitohang, P.S., Yunasfi, A., Muhtadi, 2014. Kajian Kesesuaian Ekowisata Mangrove Di Pantai Bali Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Aquacostmarine, 4 (3): 38-47.

Sitompul, O.S., Yunasfi, A. Muhtadi, 2014. Kondisi Ekologi Mangrove di Pantai Bali Desa Masjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Mitra Bahari, 8 (2): 34-47.

Taryono, 2009. *Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya*. Lecture Notes pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (PS-SPL), Dept. MSP-FPIK, IPB.